DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Basuki, S. (2009). *Hukum Agraria: Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional.* Depok: Alumni.

Basri, H, N, M & Sarjita. (2005). *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.

Djulaeka, & Rahayu, D. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gainau, M. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1*. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya: Jilid I Edisi Revisi*. Cetakan ke-11. Jakarta: Djambatan.

Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, M. Y., & Abdul Rahim L. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Lubis, M. Y. (2022). *Hukum Tanah dalam Lingkar Agraria Indonesia*. Medan: Mandar Maju.

Mardani. (2024). Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

MW. Purwaningdyah, & Agus Wahyudi. (2014). *Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Panggabean, H. P. (2023). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni.

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. (2012). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*: Semarang.

Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Leip.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rondonuwu, P. M. (2021). *Teori Hukum Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Depok: RajaGrafindo.

Salman, O., & Susanto, A.F. (2004). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.

Santoso, U. (2011). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Santoso, U. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.* Jakarta: Kencana.

Setiawan, I. K. O. (2020). *Hukum Agraria*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.

Soekanto, S. (1986). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2006). *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah.* Jakarta: Cipta Jaya.

Sutedi, A. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Gramedia.

Waskito & Hadi Arwono. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL, KARYA ILMIAH, HASIL PENELITIAN, INTERNET

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.

Ahmad, I. (2010). Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan. *Jurnal Legalitas*. 3(2), 22.

Andriyanto, R., dkk. (2022). Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol. *Journal of Legal Research*, 4(5), 1296.

Amalia, R. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Yuridika*, 23(3), 276.

Antonius, K. (2023). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 14.

Dethia, N. S. (2020). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Indonesian Notary*, 2(3), 20.

Erwiningsih, W. (1995). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, *Jurnal Hukum*, 3 (1), 23.

Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45.

Firmansyah, Y. A., & Shandy Yudha. (2022). *Ratio Decidendi* Putusan Hakim Dalam Peradilan Sengketa Tanah di Jalan Raya Cakung Seluas 77.000 m^2 (Analisis Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PN Jkt Timur. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2), 913.

Fithriah, F., dkk. (2021). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah. *Indonesian Notary*, 3(43), 9.

Gramedia, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Diakses pada 15 November 2024, pukul 20.41.

Hakim, T. R. (2023). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi di Kabupaten Kampar. *Unes Law Review*, 5(3), 871.

Halipah, G. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 140.

Harefa, D. F. (2020). Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Administratum*, 8(3), 1.

Hotijah, N. (2020). Alat Bukti Hak Milik atas Tanah yang Tanahnya Belum Bersertipikat, (Skripsi, Universitas Jember).

Hutagalung, Z. A. (2022). Analisis Yuridis Surat Keterangan Ganti Rugi Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah. *Ensiklopedia of Journal*, 5(1) 253.

Hukum Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diakes pada 08 Februari 2025, pukul 14.13.

Julyano, M. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 20.

Karjoko, L., dkk. (2017). Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare Promoting Plantation. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 1.

Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang, Penetapan Standar Pelayanan Kecamatan Bukti Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2023, (Tanjungpinang: Keputusan Camat Bukit Bestari Nomor: 29 Tahun 2023).

Korompis, S. A. (2018). Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Privatum*, 6(1), 24.

Kusuma, A. I. (2019). Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum*, 3(3), 341.

Luqyana, G. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Surat Keterangan Ganti Rugi Terkait Diatasnya Telah Terbit Sertipikat Atas Nama Orang Lain. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2793-2819.

Luvianti, T., & Rasji. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 221 PK/Pdt/2014. *Unes Law Review*, 6(2), 5077.

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, https://mh.uma.ac.id/macam-macam-putusan-perdata/, Macam-Macam Putusan Perdata. Dikases pada 23 November 2024, pukul 10.30.

Maharani, M. (2016). Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Berdasarkan Perkara Perdata Nomor 56/Pdt/G/2009/PN/Pbr. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 9.

Marsinah, R. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dirgantara*, 6(2), 3.

Martiananda, T. A. (2015). Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti (Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*, 3(2), 124.

Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 220.

Nofitri, D. K. (2011). Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi Sebagai Alas Kepemilikan Tanah. (Tesis, Universitas Indonesia).

Oe, M. D. (2015). Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah. *Pranata Hukum*, 10(1), 26777.

Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertipikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Jurnal Yustisia*, 5(2), 458.

Putra, H. D. (2016). Kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Sebagai Bukti Perolehan Hak Atas Tanah di Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, (Doctoral Dissertation, Tesis Universitas Indonesia).

Rifqianda, R. (2024). Problematika Kepastian Hukum Pada Pendaftaran Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal Sains Student Research*, 2(2), 18-25.

Rizka, D., & Taufiqurrohman. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 558.

Rumanti, Y. (2010). Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah-Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, (Tesis, Universitas Diponegoro).

Saifuddin, S. S., & Yulia Qamariyanti. (2022). Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama. *NoLaJ*, 1(1), 32.

Sembiring, A. N. (2024). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Akibat Eksekusi Putusan Pengadilan. *Hangoluan Law Review*, 3(1),322.

Shidarta. (2014). Keadilan Menurut Ulpianus, *Universitas Binus: Rubric of Faculty Members*. (https://business-law.binus.ac.id/2014/11/03/keadilan-menurut-ulpianus/, diakses pada 19 Maret 2025, pukul 12.23.

Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Eletronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 52.

Silviana, A., & Farah Rana Yunita. (2019). Uang Kerohiman Sebagai bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknya. *Jurnal Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, 4(2), 340.

Sistem Informasi Pelayanan Publik Indonesia Kecamatan Bengkalis, https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8162791/kecamatan-bengkalis/surat-keterangan-ganti-rugi-skgr-tanah. Diakses pada 08 Februari 2024, pukul 11.30.

Solechan, S. (2019). Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(3), 541-557.

Sumardjono, M. S. W. (1997). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Mediasi. *Era Hukum*, 3(11), 12.

Sy, Musthofa. (2022). Ketentuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. *Mahkamah Agung*, 5.

Tanjung, A., & Amad Sudiro. (2023). Implikasi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dengan Menggunakan Dokumen Palsu. *Unes Law Review*, 5(4), 3385.

Tjondronegoro, S. M., & Wiradi, G. (2004). Menelusuri Pengertian Istilah "Agraria", *Jurnal Analisis Sosial*, 1-8.

Yuniarti. (2021). Penelitian Evaluatif dalam Pendidikan, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, 1(1), 75.

Yunanto, (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 198.

Zega, K. (2018). Jual Beli Tanah Berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Di Tua Pejat Kepulauan Mentawai. *Nagari Law Review*, 2(1), 91.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.